

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Semarang

Disusun Oleh :

Nasroniyah

NIM. E2B017021

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nasroniyah
Nomor Induk Mahasiswa : E2B017021
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi/ S1 Akuntansi
Judul Skripsi : “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Semarang”

Telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Semarang, 05 Agustus 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. Hardiwinoto, M.Si

NIDN. 0628026802

Dosen Pembimbing II



Ida Kristiana, SE., M.Si

NIDN. 0601037402

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi




Dr. Fatmasari Sukesti, SE., M.Si

NIDN.0622056603

ii

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Nama Mahasiswa : Nasroniyah
Nomor Induk Mahasiswa : E2B017021
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi/ S1 Akuntansi
Judul Skripsi : “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 16 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Dewan Penguji

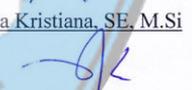
1. Pembimbing 1


Dr. Hardiwinoto, S.E., M.Si

2. Pembimbing 2


Ida Kristiana, SE, M.Si

3. Penguji 1


Andwiani Sinarasri, SE, M.Si

4. Penguji 2


R. Ery Wibowo, SE, Msi, Akt. CA

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG**

Nasroniyah

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Semarang

Nasroniyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di BPKAD kota Semarang. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah standar akuntansi keuangan pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia.

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan yang ada di BPKAD kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer pada hasil kuesioner 100 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda dengan data diperoleh menggunakan metode kuantitatif yaitu survei menggunakan media kuesioner dengan teknik yaitu *random sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara bersama-sama standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuan daerah, dan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada badan pengelolaan keuangan aset dan daerah kota semarang.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

***THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARDS, REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING
SYSTEMS, AND HUMAN RESOURCES ON THE QUALITY OF REGIONAL
GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS IN THE REGIONAL FINANCIAL
AND ASSETS MANAGEMENT AGENCY OF SEMARANG CITY***

Nasroniyah

Accounting Study Program

Muhammadiyah University of Semarang

Nasroniyah@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine and analyze the effect of government accounting standards, regional financial accounting systems, and human resources on the financial quality of local governments. This research was conducted at BPKAD Semarang city. The dependent variable in this study is the quality of local government financial reports. While the independent variables of this study are government financial accounting standards, regional financial accounting systems, and human resources.

The population in this study is the financial division of the BPKAD in the city of Semarang. The data used is primary data on the results of the questionnaire of 100 respondents and the data that can be processed are 100 questionnaires. The analytical method used is multiple regression analysis method with data obtained using quantitative methods, namely a survey using a questionnaire media with a technique that is random sampling.

The results showed that the government accounting standard variable had a significant effect on the quality of local government financial reports, human resources had a significant effect on the quality of local government financial reports. While the regional financial accounting system does not affect the quality of local government financial reports. Taken together, government accounting standards, regional financial accounting systems, and human resources have a positive and significant impact on the quality of local government financial reports on asset and regional financial management agencies in the city of Semarang.

Keywords : Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting Systems, Human Resources, Quality of Local Government Financial Reports.

1. Pendahuluan

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2000 memberikan dampak dari tuntutan masyarakat agar lebih meningkatkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa agar tercipta dan terselenggara pemerintahan yang baik dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Paradigma tersebut mewajibkan agar setiap satuan kerja perangkat daerah termasuk pemerintah untuk lebih mempertanggungjawabkan keuangan daerah serta mampu memberikan laporan informasi keuangan yang berkualitas secara transparan kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat lebih berguna bagi para pengguna, *stakeholder* dan masyarakat jadi, dalam mewujudkan upaya tersebut pemerintah harus melakukan tindakan perbaikan dalam laporan keuangan supaya laporan keuangan yang berkualitas (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010).

Semua entitas termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana laporan keuangan ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD) serta yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja entitas tersebut. Keuangan daerah dalam PP Nomor 58 tahun 2005 merupakan hak dan kewajiban sebuah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang di dalamnya termasuk bentuk dan segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU No 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang

dapat dimiliki oleh daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan adanya keuangan daerah untuk pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat (Khusaini, 2018).

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I-2020 untuk tahun pelaporan 2019, mencatat masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dari 56 LKPD Tahun 2019 yang diperiksa BPK, tercatat sebagai berikut :

Tabel 1.1

Fenomena

No	Opini	Jumlah LKPD	Persen
1	WDP	56	9 %
2	TMP	0	1 %
3	WTP	0	0 %
	Jumlah	36	10 %

Sumber : www.bpk.go.id

LKPD Tahun 2019 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Badan pemeriksa keuangan juga mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1,52%. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah (www.bpk.go.id).

Salah satu upaya mewujudkan pemerintah yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Mardiasmo (2002), sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengembalian keputusan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, secara teoritis penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mencapai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dengan menerapkan pernyataan yang terkandung dalam standar akuntansi pemerintahan. Menurut Kusumah (2012) penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut Inapty (2016) yang memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) masih

belum maksimal dilakukan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Menurut Pujanira (2017) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat. Sedangkan menurut Wardani (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih lemah, sehingga tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah umumnya terjadi karena pejabat atau petugas yang tidak optimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lemah dalam pengawasan dan pengendalian dan kurang koordinasi antar pejabat terkait.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menyatakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Menurut Andini (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut widyatama (2017) sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan sehingga kualitas laporannya diragukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH"

2. Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana pegawai/manajer lebih termotivasi bekerja untuk kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu (Donaldson, 1989). Teori ini juga menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut.

Stewardship mengasumsikan dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *steward* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai *steward* yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa

yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin, 2011).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasan yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. FASB dalam SFAC No. 2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan (*disclosure*). Kriteria tersebut digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik

kualitatif yang digunakan oleh IAI adalah relevan, keandalan (*reliability*), dan daya banding (*comparability*), dapat dipahami (*understandability*).

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berguna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki Berikut penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi

mereka di masa lalu, Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, dan Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: Penyajian Jujur yaitu Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, Dapat Diverifikasi (*verifiability*) yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh dan Netralitas yaitu Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun penjelasannya seperti berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventaris aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan

Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Keuangan Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan dari kegiatan operasional, beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi dan Surplus atau defisit.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- 1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 2) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas.
- 3) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru, maksudnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menjelaskan berdasarkan PAD. Perubahan

yang cukup fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pengelola keuangan negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

Menurut Badjuri dan Trihapsari (2004) Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Andrian, 2010). Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Stadler, C., & Nobes, C. W. (2018), Adapun akuntansi untuk hibah pemerintah berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional menunjukkan bahwa hibah aset secara ekonomis penting bagi beberapa perusahaan dan frekuensi hibah berbeda secara signifikan di seluruh negara perusahaan dapat

menunjukkan hibah sebagai pendapatan ditangguhkan atau bersih terhadap aset pilihan kebijakan harus dihapus dari standar akuntansi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, standar akuntansi pemerintah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. SAP Berbasis AkruaI

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis AkruaI, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis akruaI tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akruaI, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

- a. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
- b. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
- c. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
- d. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.

- f. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan entitas.
- g. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

2. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari :

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris.

4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus

disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi.

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap.

Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peraltan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/ pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan diperoleh.
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- c. Aktiva tersebut masih dalam proses pengerjaan.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

10. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan Operasional adalah pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 secara garis besar terdiri atas empat prosedur yaitu :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, penggolongan peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang,

surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutase barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Menurut Kemendagri No.29 tahun 2002 indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mencakup :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
2. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam dilakukan

berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi. Transaksi yang terjadi juga harus disertai bukti transaksi. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis.

3. Pembuatan Laporan Keuangan secara Periodik. Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Berkaitan dengan laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Setiap proses akuntansi yang terjadi di lingkungan satuan kerja akan tercermin dalam laporan keuangan.

2.1.6 Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2001) Sumber daya manusia yaitu Manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain. Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada Matindas (2002). Sebagai kesatuan,

sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

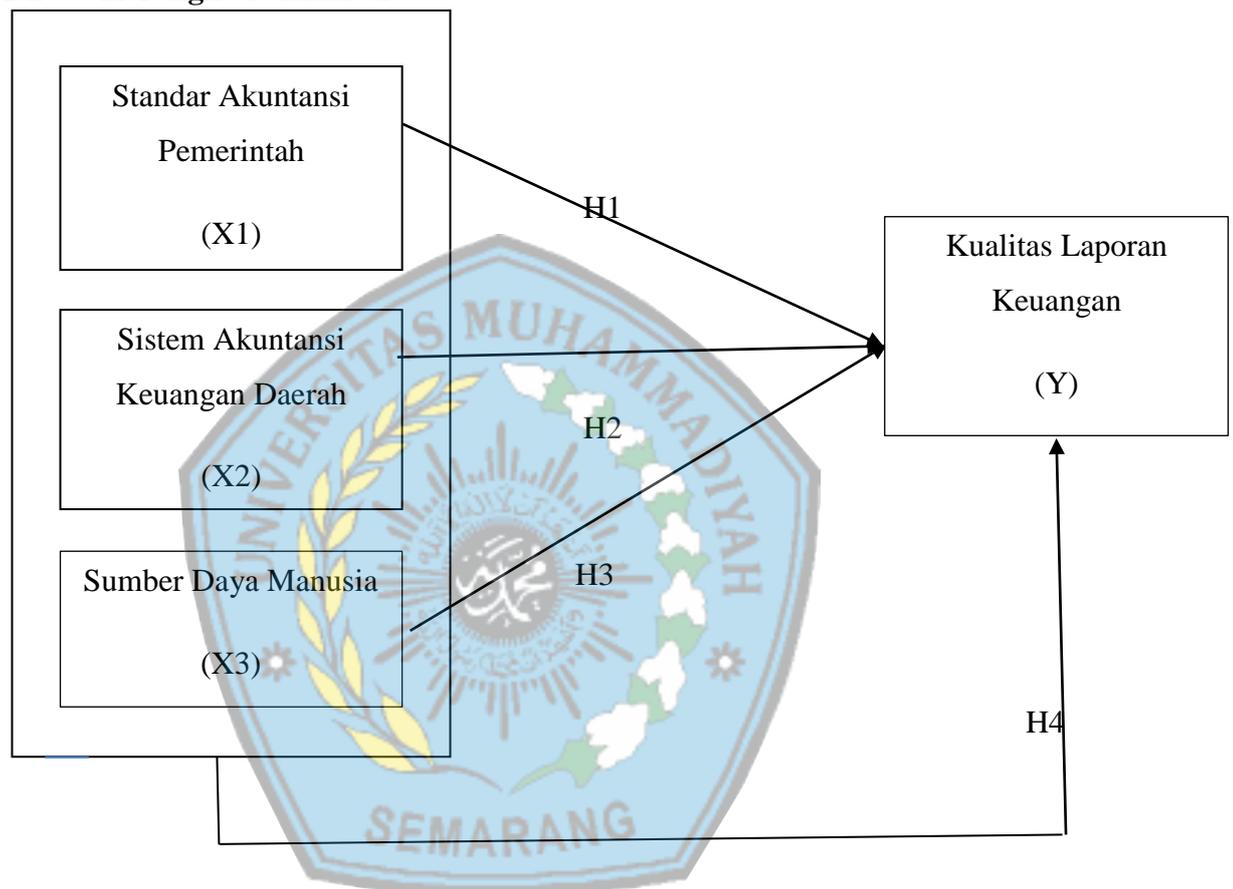
M.T.E Hariandja (2002) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor pada suatu perusahaan dilihat dari faktor lainya selain modal. Maka dari itu SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efesiensi organisasi semakn meningkat baik. Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.
2. Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian diatas menurut bebrapa ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kompeten

atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia agar dapat dimanfaatkan dan dipratikkan untuk efektivitas dan pencapaian yang akan dicapai dalam suatu kelompok atau organisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Perumusan Hipotesis

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



3. Metode Penelitian

3.1 Variable Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012 : 59). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, dikarenakan adanya variabel bebas atau variabel tidak terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan

2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tertentu dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Definisi variable dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran	Sumber Indikator
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, 2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, 3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas, 4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan, 5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan, 6. PSANo. 06 Akuntansi Investasi, 7. PSAP No. 07 Akunansi Aset Tetap, 8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan, 9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban, 10. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan, 11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi, 12. PSAP No. 12 Lapora Operasional 	Skala likert 1-5	Pujanira (2017) Kusumo (2018)
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2. prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar akuntansi berlaku umum, 3. pembuatan laporan keuangan yang 	Skala likert 1-5	Pujanira (2017) Kusumo (2018)

	keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007).	dilakukan secara periodik		
Sumber Daya Manusia (X3)	Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibanding elemen lain selain modal, teknologi, dan uang, sebab manusia yang akan mengendalikan sumber daya lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Sikap 	Skala Likert 1-5	Pujanira (2017) Wardani (2017)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah kriteria-kriteria yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat tercapai suatu tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan, 2. Andal, 3. dapat dipahami, 4. dapat dibandingkan. 	Skala likert 1-5	Pujanira (2017), Adhitama (2017) Hardyanayah (2016).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang didalamnya terdapat informasi yang berguna bagi peneliti (Sugiyono. 2015). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan badan pengelola keuangan aset dan daerah kota semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

Tabel 3.2
Pegawai BPKAD

No	BPKAD	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Bagian Hukum	Bendahara Pengeluaran
2	Bagian Administrasi	Bendahara Pengeluaran
3	Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran
4	Bagian Administrasi Perekonomian	Bendahara Pengeluaran
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Bendahara Pengeluaran
6	Bagian Layanan Pengadaan	Bendahara Pengeluaran
7	Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran
8	Bagian Hubungan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran
9	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bendahara Pengeluaran
10	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran
11	Inspektur	Bendahara Pengeluaran
12	Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran
14	Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Pengeluaran
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Bendahara Pengeluaran
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran
18	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
19	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Bendahara Pengeluaran

20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan	Bendahara Pengeluaran
21	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran
23	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Bendahara Pengeluaran
25	Dinas Pertanian	Bendahara Pengeluaran
26	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran
27	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
28	Dinas Penanggulangan Kebakaran	Bendahara Pengeluaran
29	Badan Penanggulangan Becanda Daerah	Bendahara Pengeluaran
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
31	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
33	Badan Keuangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiono (2014) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka, dapat ditarik kesimpulan dan dapat diberlakukan untuk populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling*, *random sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila

anggota populasi dianggap *homogeny*. Dimana peneliti menemui subyek penelitian di BPKAD Semarang secara sembarang dan peneliti melakukan penelitian hingga mencapai jumlah yang dianggap cukup bagi peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2012: 23). Data tersebut kemudian dianalisis dan diolah ke dalam bentuk analisis statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tanpa melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung mengenai standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisoner. Kuisoner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisoner salah satu teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuisoner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui

pos, atau internet. Penulis menyebarkan kuesioner yang berupa angket. kepada pegawai bidang akuntansi yang bekerja di BPKAD Kota Semarang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh keakuratan data dengan mempelajari, memahami literatur atau buku-buku yang relevan, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian.

2. Kuisoner

Merupakan metode perolehan data dengan mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak peneliti.

3. Observasi

Merupakan Pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau lokasi secara langsung.

4. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang di wawancarai.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel
Statistik Deskriptif

Statistics Deskriptif

		Standar Akuntansi Pemerintah	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia	Kualitas Laporan Keuangan
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		106,68	77,43	54,27	44,00
Median		110,00	80,00	56,00	44,00
Std. Deviation		15,695	12,273	8,180	5,696
Minimum		68.00	41.00	30.00	29.00
Maximum		140.00	100.00	69.00	55.00
Sum		10668	7743	5427	4400

Sumber: Data diolah, 2021

4.2 Hasil Uji Validitas

Tabel Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintah

No	<i>Pearson Correlation</i>	r table	Keterangan
1	0,516	0,195	Valid
2	0,471	0,195	Valid
3	0,637	0,195	Valid
4	0,555	0,195	Valid
5	0,682	0,195	Valid
6	0,599	0,195	Valid
7	0,585	0,195	Valid
8	0,364	0,195	Valid
9	0,588	0,195	Valid
10	0,693	0,195	Valid
11	0,657	0,195	Valid
12	0,680	0,195	Valid
13	0,558	0,195	Valid

14	0,480	0,195	Valid
15	0,634	0,195	Valid
16	0,688	0,195	Valid
17	0,682	0,195	Valid
18	0,686	0,195	Valid
19	0,637	0,195	Valid
20	0,618	0,195	Valid
21	0,696	0,195	Valid
22	0,568	0,195	Valid
23	0,410	0,195	Valid
24	0,497	0,195	Valid
25	0,731	0,195	Valid
26	0,710	0,195	Valid
27	0,748	0,195	Valid
28	0,527	0,195	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pada tabel diatas, semua pernyataan variabel standar akuntansi pemerintah dikatakan valid karena nilai *pearson correlation* atau nilai *r* hitung lebih besar dari nilai *r* tabel 0,195. Semua dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.

Tabel
Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No.	<i>Pearson Correlation</i>	r table	Keterangan
1	0,507	0,195	Valid
2	0,729	0,195	Valid
3	0,787	0,195	Valid
4	0,678	0,195	Valid
5	0,624	0,195	Valid
6	0,656	0,195	Valid
7	0,672	0,195	Valid
8	0,704	0,195	Valid
9	0,642	0,195	Valid
10	0,597	0,195	Valid
11	0,695	0,195	Valid
12	0,481	0,195	Valid
13	0,784	0,195	Valid
14	0,709	0,195	Valid
15	0,746	0,195	Valid
16	0,616	0,195	Valid

17	0,711	0,195	Valid
18	0,655	0,195	Valid
19	0,566	0,195	Valid
20	0,730	0,195	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pada tabel diatas, semua pernyataan variabel sistem akuntansi keuangan daerah dikatakan valid dengan nilai *pearson correlation* atau nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 0,195. Semua item pernyataan dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.

Tabel Uji Validitas Variabel Sumber Daya Manusia

No.	<i>Pearson Correlation</i>	r table	Keterangan
1	0,471	0,195	Valid
2	0,561	0,195	Valid
3	0,645	0,195	Valid
4	0,567	0,195	Valid
5	0,646	0,195	Valid
6	0,575	0,195	Valid
7	0,619	0,195	Valid
8	0,600	0,195	Valid
9	0,699	0,195	Valid
10	0,696	0,195	Valid
11	0,674	0,195	Valid
12	0,643	0,195	Valid
13	0,631	0,195	Valid
14	0,655	0,195	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pada tabel diatas, semua pertanyaan variabel sumber daya manusia dikatakan valid dengan nilai *pearson correlation* atau nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 0,195. Semua item pertanyaan dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.

Tabel
Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No.	Pearson Correlation	r table	Keterangan
1	0,517	0,195	Valid
2	0,525	0,195	Valid
3	0,664	0,195	Valid
4	0,523	0,195	Valid
5	0,479	0,195	Valid
6	0,496	0,195	Valid
7	0,181	0,195	Valid
8	0,742	0,195	Valid
9	0,743	0,195	Valid
10	0,652	0,195	Valid
11	0,660	0,195	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pada tabel diatas, semua pertanyaan variabel kulitas laporan keuangan dikatakan valid dengan nilai *pearson correlation* atau nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 0,195. Semua item pertanyaan dapat digunakan sebagai data dalam penelitian.

4.3 Uji Reliabilitas

Tabel
Hasil Uji Reliabilitas

NO.	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,936	Reliabel
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,934	Reliabel
3	Sumber Daya Manusia (X3)	0,876	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,788	Reliabel

Sumber : Data yang telah diolah, 2021

Dari output diatas menunjukkan bahwa setiap variable dinyatakan reliabel. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh pernyataan kuisioner memiliki nilai *Cronbach Alphavariabel* lebih dari 60 % . maka dapat disimpulkan bahwa ke empat variabel diatas bernilai diatas ,< 0,60 maka bisa dikatakan bersifat reliabel.

4.4 Uji Normalitas

Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,53387088
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		,833
Asymp. Sig. (2-tailed)		,491

Sumber : Data yang telah diolah, 2021

Dari hasil perhitungan spss dalam penelitian ini, dapat dikatakan tingkat signifikan X_1 , X_2 , dan X_3 dari hasil uji *kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,833 sehingga dapat dikatakan nilai tersebut menunjukkan asumsi normalitas terpenuhi. Berdasarkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* dengan nilai 0,491 yang berarti lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5 Uji Multikolinearitas

Tabel
Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constan)	12,349	2,701		4,573	,000		
	SAP	,113	,048	,313	2,349	,021	,237	4,214
	SAKD	-,004	,059	-,008	-,061	,952	,253	3,945
	SDM	,367	,063	,538	5,837	,000	,495	2,022

Sumber : Data yang telah diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan dari spss diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) sebesar 0,237, sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) sebesar 0,253 dan sumber daya manusia (X_3) sebesar 0,495 yang berarti ketiga variabel tersebut memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dan juga nilai VIF memiliki nilai masing-masing sebesar 4,214 (X_1), 3,945 (X_2) dan 2,022 (X_3) yang berarti memiliki nilai VIF lebih besar dari 10,0. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas dan memenuhi uji asumsi multikonolieritas.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Tabel
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,568	1,705		3,265	,002
	Standar Akuntansi Pemerintah	-,012	,030	-,081	-,393	,695
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-,009	,038	-,050	-,251	,802
	Sumber Daya Manusia	-,017	,041	-,059	-,406	,686

Sumber : Data yang telah diolah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 0.05, maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat menggunakan *scatterplot* sebagai berikut:

4.7 Uji Autokorelasi

Tabel

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.615	.603	3.589	2.187

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data penelitian terdapat autokorelasi positif, terbukti dengan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,187

yang berada dibawah atau lebih besar dari batas $dl - du$ pada tingkat signifikansi 5 %, jumlah sampel 100 dan jumlah variabel bebas 3. Diketahui dari Tabel *Durbin Watson* bahwa nilai batas atas dan bawah, $dl = 1,6131$ dan $du = 1,7364$. Nilai $DW > DU$ maka tidak ada masalah autokorelasi.

4.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,737	2,654		4,423	,000		
	X1	,101	0,47	,278	2,130	,036	,235	4,260
	X2	,022	0,59	,047	,376	,707	,252	3,967
	X3	,364	0,63	,523	5,754	,000	,485	2,063

Sumber : Data yang telah diolah 2021

Dari tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 11,737 + 0,101 X_1 + 0,022 X_2 + 0,364 X_3 + e$$

4.9 Uji Statistik T (Parsial)

Tabel
Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,737	2,654		4,423	,000
	Standar Akuntansi Pemerintah	,101	,047	,278	2,130	,036
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,022	,059	,047	,376	,707
	Sumber Daya Manusia	,364	,063	,523	5,754	,000

Sumber : data yang diolah 2021

Hasil dari uji t setiap variabel menunjukkan bahwa :

- a. Variabel standar akuntansi pemerintah nilai signifikansi sebesar yaitu 0,036 < 0,05 yang mengindikasikan H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah nilai signifikansi sebesar yaitu 0,707 > 0,05 yang mengindikasikan H_a ditolak dan H_0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Variabel sumber daya manusia nilai signifikansi sebesar yaitu 0,000 < 0,05 yang mengindikasikan H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.10 Uji statistik F

Tabel
Hasil Uji Statistik F

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1975,664	3	658,555	51,136	,000 ^a
	Residual	1236,336	96	12,879		
	Total	3212,000	99			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji f) pada tabel di atas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil

dari *significance level* 0,05 (5 %), yaitu $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), dan sumber daya manusia (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.11 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.20
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 ^a	,615	,603	3,589

Sumber: Data yang diolah, 2021

Pada output diatas menggunakan tabel Model Summary yang diperoleh nilai *R Square* pada model regresi sebesar 0,615. Hal ini menunjukkan bahwa 61,5 % variabel dependen yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Nilai ini mencerminkan terjadinya hubungan antar variabel bebas X_1 , X_2 dan X_3 dan variabel terikat Y.

4.12 Pembahasan Hasil Penelitian

4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan dari kuesioner yang telah disebar dan pernyataan dari seluruh responden bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan kategori positif yang bisa kita lihat dari hipotesis pertama dimana hasil uji t pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel standar akuntansi pemerintah sebesar

$0,036 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.130 sedangkan t tabel 1,988. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2.130 > 1.988$ yang memaparkan hasil bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka semakin berkualitas juga suatu laporan keuangannya.

Dilihat dari karakteristik responden yang ada salah satunya adalah pendidikan dapat kita lihat bahwa para responden sebanyak 47 % menempuh pendidikan sarjana S1, sehingga pengetahuan tentang penerapan standar akuntansi pemerintah) sudah dimiliki oleh para pegawai keuangan dan bisa diterapkan dengan benar dalam menunjang kualitas laporan keuangan. Jadi dengan hal ini juga bisa dikatakan suatu karakteristik responden dengan pendidikan dapat juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan seperti juga hasil analisis data diatas.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putriasri dan Pujanira (2017) dimana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan menyatakan bahwa jika penerapan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan semakin baik maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan dari kuesioner yang telah disebar dan pernyataan dari seluruh responden serta hasil uji hipotesis yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa hasil uji t pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar $0,707 > 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,376 dan t tabel sebesar 1,988. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $0,376 < 1,988$. yang memaparkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan dinas disatuan kerja BPKAD belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan yang salah satunya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ihsanti, Emilda (2014) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kartopawiro dan Susanto (2018) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam penyusunan laporan keuangan sudah baik namun bukan menjadi tolak ukur untuk menentukan baik atau buruknya kualitas laporan keuangan dan masih terjadi pencatatan yang dilakukan secara tidak kronologis, hal ini juga dapat memengaruhi kualitas dari laporan keuangan karena apabila semua komponen-komponen dilakukan dengan baik maka hal tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan dari kuesioner yang telah disebar dan pernyataan dari seluruh responden bahwa pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan kategori positif yang bisa kita lihat dari hipotesis pertama dimana hasil uji t pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel sumber daya manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 5.754 sedangkan t table 1,988. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $5.754 > 1.988$ yang memaparkan hasil bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam

menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pramudityo (2017) dan Pujanaira (2017) yang menyatakan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji f), didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%), yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara f hitung dan f tabel yang menunjukkan nilai f hitung sebesar 51,136 sedangkan f tabel sebesar 2,70. Dari hasil tersebut terlihat bahwa f hitung $>$ f tabel yaitu $51,136 > 2,70$ bahwa secara simultan H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Sumber Daya Manusia (X3) yaitu berpengaruh secara signifikan

positif terhadap variabel dependen Kualitas laporan keuangan pemerintah kota Semarang (Y).

Hasil ini membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia memiliki potensi atau peluang yang sangat tinggi dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan berkualitas jadi, semakin tinggi dan baik ketiga variabel digunakan, di implementasikan serta dipahami dengan baik maka suatu laporan keuangan pemerintah yang akan dihasilkan kan menjadi semakin baik dan efektif. Sebaliknya jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia tidak digunakan dengan baik maka hasilnya pun tidak akan baik atau kurang efektif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu, Adithama (2012) dimana hasilnya untuk ketiga variabel yang dipakai untuk menguji suatu kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. hal itu dikatakan bahwa penerapan sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dikatakan juga oleh peneliti bahwa semakin baik suatu penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia maka semakin berkualitas dan baik pulalah suatu laporan keuangan pemerintahannya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan :

1. Variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,036 < 0,05$ nilai t hitung $2,130 > 1,988$ t table. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka semakin berkualitas juga suatu laporan keuangannya.
2. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,707 > 0,05$ t hitung $376 < 1.988$ t table. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan yang di pakai di pemerintahan kota semarang pencatatan transaksi keuangan daerah, kesesuaian standar akuntansi pemerintah, prosedur pencatatan akuntansi kurang bagus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan pembuatan laporan keuangan secara periodik kurang konsisten sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang kurang berkualitas.
3. Variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ t hitung $5,754 > 1,988$ t table. Semakin baik sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Berdasarkan Uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambah variabel Pengendalian Intern dan Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansyah (2016).
2. Populasi penelitian tidak hanya pada satu BPKAD Pemerintah Kota Semarang, akan tetapi dapat dikembangkan ke Semarang Raya atau lokasi yang lebih luas dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat* , Jakarta.
- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktek)*. Jakarta : Rajawali
- Andini, dan Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 24 No. 1* .
- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol.5 N: 01 h: 69-80*.
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, 2004, “*Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah.*”
- Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Bastian (2007), faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *jurnal Akuntansi Vol. No 1 Hal. 59*
- BKN No 4A Tahun 2007 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia
- BPK RI. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016. Diakses pada 22 Desember 2016. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Donaldson, Lex., Davis, James H. 1989. “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns”.*Australian Journal of Management, 16: 49-64*.
- Erlina, Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian : Sumatera Utara
- Halim (2007), Pengaruh penerapan system akuntantansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variable moderisasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 14 No.1 Hal 58*
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hariandja Hal 3. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Hal 3*. Manajemen Sumber Daya Manusia Hal 3.
- Haryanto. 2013. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Semarang: Undip Press Semarang.
- Herawati. 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan pada PEMDA Cianjur”. *Jurnal of Study & Accounting Research. Vol. XI. NO. 1*

- Hertati Lesi. (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Literatur : Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.8, (2015) : 1-8.*
- Hullah. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi
- Ghozi Saiful (2015). *Statistik Deskriptif untuk Ekonomi*. Deepublish : Yogyakarta
- Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 2, Hal 210-218
- <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartopawiro, S & Susanto,Y.(2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. 16(1),1-14.
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press Malang.
- Kementrian Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1, No. 1
- Mahmudi (2010) pengaruh standar akuntansi pemerintahan, system pengendalian intern, system akuntansi keuangan daerah dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderisasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 4 No.1 Hal*
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2. No. 1*
- Mardiasmo (2009), Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variable moderisasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 2 Hal. 134*
- Matindas, R. 2002. *Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha*,Edisi II. Jakarta: Grafiti.
- Nawawi. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Pramudityo, B. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Tegal). *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pujanira, Putriasri. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 2

Rosalin (2011), Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variable moderisasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 2 Hal. 134*

Scott (2009), Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variable moderisasi. *Jurnal Akuntansi Vol. 8 No.2 Hal. 134*

Stadler, C., & Nobes, C. W. (2018). Accounting for government grants: Standard-setting and accounting choice. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(2), 113–129. doi:10.1016/j.jaccpubpol.2018.02.004

Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*

Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Intern, Pemanfaatan Teknologi dan Pemahaman Akuntansi. *Seminar Nasional dan Call For Paper*. ISBN: 978-602-70429-2-6

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah

Udiyanti, Ni Luh Nyoman; Atmadja, Ananta Wikrama Tungga; dan Darmawan, Nyoman Ari Surya. 2014. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi

Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng) Universitas Pendidikan Ganesha, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No1 Tahun 2014

- Wardani dan Yuwilia (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu), *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No. 2
- Widyatama, Novita & Diarespati (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 02, No. 02 .
- Yuliani Nur Laila (2016). Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol.14. No.1.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.1 No. 1 April 2011 Hal.21-37.

